

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Perkembangan PDRB

Perkembangan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat pada tahun 1985-2005 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat dari tabel 4.1 dibawah ini. Rendahnya pertumbuhan output pertanian pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh salah satunya musim kemarau yang panjang (Sutoranto, 1998:102). Nilai PDRB pertanian sebesar Rp. 187820291.3 juta rupiah, rata-rata kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar 16.15 % atau rata-rata pertumbuhannya sebesar 5.74% pertahun.

Kontribusi pertanian dari tahun 1985-1996 mengalami penurunan, itu karena mulai tahun 1984 kebijakan pembangunan ekonomi meninggalkan sektor pertanian, dengan memacu pertumbuhan industri pengolahan, yang penuh ketergantungan pada impor. Di sektor pertanian diversifikasi dilaksanakan dengan mendorong pertumbuhan komoditi ekspor (terutama kelapa sawit, kakao, udang, tuna dan cakalang) dan sayuran ras (konsumsi domestik). Kebijakan baru ini ditopang pula oleh kebijakan pembangunan yang bias perkotaan (urban bias development), termasuk kebijakan perdagangan dan nilai tukar yang sangat melindungi sektor industri. Alokasi anggaran untuk sektor pertanian menurun drastis (*Agricultural Development in Indonesia, 1988:24*). Dapat dilihat pula pada tahun 1993 PDRB sektor pertanian mengalami kenaikan yang cukup besar

yaitu Rp. 9107764 juta dengan pertumbuhan sebesar 59.13%, tapi setelah liberalisasi perdagangan ditandai dengan adanya perjanjian Putaran Uruguay WTO yang ditandatangani oleh 125 anggota GATT di Marakesh, Maroko, tahun 1994. Pada tahun itu juga PDRB sektor pertanian Jawa Barat mengalami penurunan drastis menjadi Rp. 8989698 juta dengan pertumbuhan -1.21% atau pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 60.34%. Dari perjanjian ini banyak LDCs merasa bahwa perjanjian Putaran Uruguay WTO dapat merugikan mereka, terutama dalam soal produksi dan perdagangan komoditi pertanian, industri, dan jasa.

Tabel 4.1
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian di Jawa Barat periode 1985-2005
Atas Tahun Dasar 1993

Tahun	PDRB Pertanian Tahun dasar 1993 (dalam juta rupiah)	Kontribusi %	Pertumbuhan %
1	2	3	4
1985	2582930,39	20,38	
1986	2718818,18	20,13	5,25
1987	2738090,6	19,55	0,72
1988	2987148,55	19,77	9,1
1989	3135350,31	19,11	4,96
1990	3328747,41	18,54	6,17
1991	3419646,84	17,95	2,73
1992	3692757	17,98	7,98
1993	9107764	16,89	59,13
1994	8989698	15,55	-1,21
1995	9350686	14,96	4,46
1996	9387974	13,99	-0,1
1997	8675504	12,12	-7,13
1998	8013996	13,62	-7,63
1999	9098516	15,15	13,53
2000	7842831	14,11	4,35
2001	8068324,88	13,99	3,11
2002	8047249,51	13,81	1,24
2003	7908908,31	13,2	0,09
2004	34038120,63	14,61	6,11
2005	34691239,65	14,11	1,92
Jumlah	187820291.3	339.44	114.78
rata-rata	8943823,393	16,15333333	5,739

Hal ini karena di satu sisi produk pertanian (terutama pangan), industri dan jasa di LDCs masih merupakan masalah besar dan belum efisien yang disebabkan antara lain oleh rendahnya kemampuan teknologi dan sumber daya manusianya, sedangkan di sisi lain perdagangan bebas akan menyebabkan masuknya secara besar-besaran produk LDCs yang lebih baik kualitasnya dan harganya lebih murah (Firdausy, 1998:29)

Meskipun sektor pertanian mampu bertahan pada masa krisis (tahun 1998 dan 1999), namun Tabel 4.1 juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDRB pada masa sebelum krisis. Keadaan ini menurut Soekartawi (1995:58), merupakan salah satu ciri transformasi struktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDRB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun.

Kuang lingkup agribisnis mencakup up-stream, on-farm dan down-stream atau sering disebut bidang usaha dari hulu sampai hilir dan pendukungnya. Luasnya keterkaitan sektor agribisnis ini akan memberikan dampak multiplier yang cukup besar apabila pemerintah dan dunia usaha bersama-sama meningkatkan sektor ini dan memiliki konsistensi jangka panjang sehingga perekonomian Indonesia memiliki ketahanan terhadap perubahan ekonomi yang ada. (Ringkasan Ceramah Ekonomi Prof. Dr. Bungaran Saragih, Mec dan Dr. Tungkot Sipayung di Bank BNI, 22 Pebruari 2007, Adhy Basar 2007:3)

Ketahanan sektor agribisnis terhadap tekanan perekonomian telah terbukti. Dalam krisis ekonomi 1997-1999 kontribusi sektor pertanian masih positif sebesar 13.62 % pada tahun 1998 naik sebesar 1.5% dari tahun sebelumnya 1997 sebesar 12.12% dan pada tahun 1999 naik sebesar 1.53% menjadi 15.15% , dimana ekonomi nasional terjadi kontraksi yang cukup besar. Kemampuan agribisnis tersebut antara lain disebabkan elastisitas yang tinggi dalam substitusi input dan penyesuaian target pasar. Dari sisi pasar input (faktor produksi), peningkatan harga barang modal disubstitusi oleh sub sektor agroindustri dan pertanian dengan fleksibilitas teknologi yang lebih padat karya. Apabila dilihat dari sisi target pasar, pelemahan daya beli dalam negeri disiasati dengan konsentrasi sub sektor agroindustri dan pertanian melalui penetrasi ekspor yang memiliki prospek yang cerah sebagai dampak melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan nilai harga jualnya. (Ringkasan Ceramah Ekonomi Prof. Dr. Bungaran Saragih, Mec dan Dr. Tungkot Sipayung di Bank BNI, 22 Februari 2007, Adhy Basar 2007:3)

Sektor pertanian dan pedesaan menjadi penyelamat kesempatan kerja sebagai dampak dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga menumbuhkan kembali keyakinan bahwa sektor pertanian dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu paradigma pembangunan pertanian harus diubah menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan pembangunan pertanian baru antara lain: partisipasi aktif petani dan masyarakat pedesaan

disertai pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan penguasaan lahan dan aset produktif per tenaga kerja pertanian dan pemerataan jangkauan pada aset produktif pertanian, teknologi, dan pembiayaan, diversifikasi pertanian dalam arti luas (broad base agricultural diversification), pengembangan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, pengembangan kelembagaan pertanian dan pedesaan dan pengembangan prasarana pertanian dan pedesaan, dan pengembangan basis sumberdaya pertanian. Kebijakan baru ini perlu didukung dengan pelaksanaan secara konsekuen “land reform” dan “agrarian reform”, sehingga lahan pertanian hanya boleh dimiliki oleh petani Indonesia. Untuk paket deregulasi tahun 1993 yang membolehkan penguasaan lahan 100 % oleh perusahaan swasta dan bahkan swasta asing harus ditinjau kembali. Perusahaan swasta dan asing hanya boleh menguasai pabrik pengolahan, dan petani diberi hak untuk dapat membeli saham perusahaan pengolahan untuk membina keterkaitan dan kerja sama. Hanya dengan penerapan kebijakan ini kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan dan harus didukung oleh program jaring pengaman sosial. (*Agricultural Development in Indonesia, 1988:26*).

Kontribusi sektor pertanian pada pendapatan devisa meningkat dengan drastis. Krisis ekonomi menyadarkan akan barbadat kebebasan pembangunan ekonomi nasional setelah tahun 1984. Ekonomi nasional harus dibangun dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya domestik (sumberdaya alam dan tenaga kerja) secara berkeadilan. Pembangunan tersebut harus melibatkan secara aktif masyarakat dalam perekonomian (“ekonomi kerakyatan”) disertai

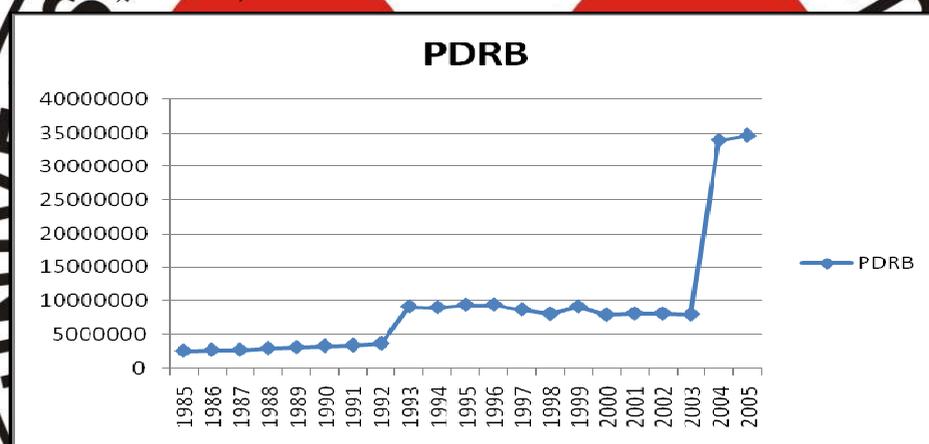
desentralisasi manajemen pembangunan (**Agricultural Development in Indonesia, 1988:28**).

Seperti diketahui bahwa sebagian besar petani kita adalah petani gurem berlahan sempit (penguasaan lahan <0.25 ha). Kondisi yang demikian, tidak hanya menyebabkan mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses sumberdaya lahan untuk memperluas skala ekonomi usaha, tetapi juga mereka juga kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan melalui Bank, sumber teknologi dan informasi dan pasar.

Kondisi yang dihadapi petani tersebut merupakan persoalan mendasar yang harus diselesaikan agar pertanian Indonesia maju kedepan. Namun penyelesaian persoalan mendasar tersebut tidak bisa diselesaikan secara menyeluruh dalam waktu cepat tetapi dilakukan secara bertahap karena menyangkut kemampuan pembiayaan, kondisi sosial budaya masyarakat yang melekat dalam sistem pertanian Indonesia. Inilah sebenarnya faktor utama yang menyebabkan mengapa kemajuan pertanian Indonesia agak lambat. Saat ini investasi swasta pada sektor pertanian masih rendah, bukan karena ketidaklayakan sektor pertanian tetapi disebabkan oleh sistem pertanian yang Indonesia yang belum diorganisasi secara baik sehingga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari sektor swasta. Saat ini Departemen Pertanian telah melakukan perbaikan mengenai organisasi usaha petani yang diharapkan mampu menarik investasi swasta ke depan.

Perlahan-lahan kontribusi PDRB sektor pertanian mengalami pemulihan pada tahun 2003-2004, itu dapat dilihat dengan pertumbuhannya mengalami

pertumbuhan yang tinggi dari 0.09% pada tahun 2003 dan mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 6.11% atau peningkatannya sebesar 6.06%. akan tetapi itu tidak bertahan lama pada tahun 2005 mengalami penurunan yang sangat tajam jika dilihat dari pertumbuhannya dari 6.11% pada tahun 2004 turun menjadi 1.92% pada tahun 2005, hal ini terjadi karena adanya dampak dari kenaikan BBM dan juga banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, pengetahuan dan teknologi pertanian yang masih rendah, serta adanya kebijakan-kebijakan yang dirasakan belum berpihak pada pertanian (BPS Jawa Barat, 2005:30).



Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.1 perkembangan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat periode tahun 1985-2005

Melihat grafik perkembangan PDRB diatas dapat dilihat bahwa peningkatan Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor pertanian tertinggi ada pada tahun 2004 sebesar 34.032.120,63 juta akan tetapi peningkatan NTB tidak sepadan dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian yang hanya tumbuh sebesar 1.53% terhadap PDRB itu dikarenakan adanya laju penurunan peran sektor pertanian secara relatif didalam ekonomi cenderung berasosiasi

dengan tiga hal berikut. Pertama, Pangsa PDRB awal dari sektor non pertanian relatif lebih tinggi dari pangsa PDRB awal dari pertanian sehingga laju pertumbuhan output yang relatif rendah dari pada kontribusi yang relatif tinggi yang dirasakan oleh sektor pertanian, kedua, laju pertumbuhan output pertanian yang relative rendah, ketiga, laju pertumbuhan output sector-sector non pertanian yang relative tinggi (yang membuat suatu perbedaan positif yang besar antara pangsa output nonpertanian dan pangsa output pertanian). (Tulus Tambunan 2001:199).

Ketangguhan agribisnis Indonesia yang demikian dimungkinkan karena berbagai faktor fundamental yang dimiliki agribisnis, seperti memiliki basis yang kuat di dalam negeri (domestic resources based), memiliki kelenturan teknologi, skala usaha, dan berorientasi ekspor. Selain itu kelenturan pembiayaan yang luas menambah ketahanan sektor ini terhadap perubahan kondisi perekonomian.

Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada: (1) pengembangan sumber daya pertanian yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan, melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi, (2) pendekatan pembangunan melalui sistem agrobisnis dan kawasan, dengan pengembangan kinerja masing-masing subsistem agrobisnis, serta membangun sinergi jejaring antara simpul-simpul sistem agrobisnis; (3) pengembangan wilayah; (4) penanganan kemiskinan; (5) optimalisasi investasi pertanian; serta (6)

pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektor dan lintas kabupaten/kota.

4.1.2 Perkembangan Investasi (PMA dan PMDN)

Perkembangan investasi (PMA dan PMDN) sebelum dan sesudah krisis moneter dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah. Nilai investasi PMDN sebesar Rp. 2.698.502,02 juta dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 166,81% dan nilai investasi PMA sebesar Rp.215.944,39 juta rupiah dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 212,67%.

Semenjak diberlakukannya undang-undang No. 1/Tahun 1967 jo.No. 11/Tahun 1970 tentang PMA dan undang-undang No.6/Tahun 1968 jo.No. 2/tahun 1970 tentang PMDN, investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini dapat dilihat bahwa peningkatan investasi dalam negeri (PMDN) dari tahun 1985-1988 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi Rp 48.138 juta tahun 1985 sampai Rp. 299.522 - juta pada tahun 1988. Diikuti pula dengan kenaikan investasi luar negeri yang cukup besar dari tahun 1985 Rp. 1000 juta rupiah meningkat menjadi Rp. 32.993.000 juta rupiah tahun 1986 untuk sektor pertanian. Itu menunjukkan bahwa para investor mengetahui keuntungan yang akan didapatkan dari negara berkembang seperti Indonesia dengan SDA yang memadai untuk diolah. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan, tahun 1987 penurunan investasi asing mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar (-79.07%) dan pada tahun 1988 -72.62% yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum di Indonesia tentang investasi, pajak yang diterapkan oleh pemerintah tinggi sekali serta bea masuk investasi terlalu banyak pungli, dan

kebijakan insentif yang belum kompetitif. (**Biro Hukum Dan Humas, BKPM 2007:25**)

Kurun waktu 1989-1993 investasi untuk sektor pertanian mengalami masa yang sangat muram dimana penurunan investasi baik PMA maupun PMDN mengalami penurunan sampai nol (0) pada tahun 1992 untuk PMDN dan 1992-1993 penurunan sampai batas nol terjadi pada PMA, atau sama sekali tidak ada proyek untuk pertanian, karena dalam skala makro, di antara pembangunan yang ditandai dengan transformasi struktur ekonomi dan demografi, pada akhir 1980-an telah terjadi fenomena alih fungsi (**konversi**) lahan pertanian menjadi nonpertanian itu yang menyebabkan para investor mengalihkan ke sektor non pertanian yaitu sektor industri. Sementara itu menurut penelitian **Pakpahan et al. (1993)** menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pertanian ke nonpertanian di Jawa Barat adalah pertumbuhan ekonomi sektor nonpertanian lebih dekat kepada pusat kegiatan *Central Business District* / CBD maka laju konversi semakin besar dan semakin lemahnya implementasi undang-undang serta besarnya pajak yang diterapkan oleh pemerintah tingkat tinggi. Dalam skala mikro **Syafa'at et al. (1993)** menyebutkan bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian ke nonpertanian adalah alasan klasik petani adalah kebutuhan, serta lahan pertanian yang dekat dengan kawasan industri, serta harga lahan yang tinggi. Selain itu juga pada tahun 1992 dikeluarkannya PP No. 17 tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA dan KEPRES No. 97 Tahun 1993 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka PMDN

dan PMA serta petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal sehingga pemerintah menutup 6 sektor usaha (pertanian termasuk didalamnya) untuk investasi asing karena alasan keamanan nasional, lingkungan serta alasan-alasan lain sehingga pada tahun 1992-1993 PMA nol. Dan peraturan tahun 1992 berimbas pada PMDN yang jumlah investasinya nol.

Tabel 4.2
Perkembangan Investasi Dalam Negeri dan Investasi Luar Negeri Menurut Sektor Pertanian Di Jawa Barat Periode 1985-2005

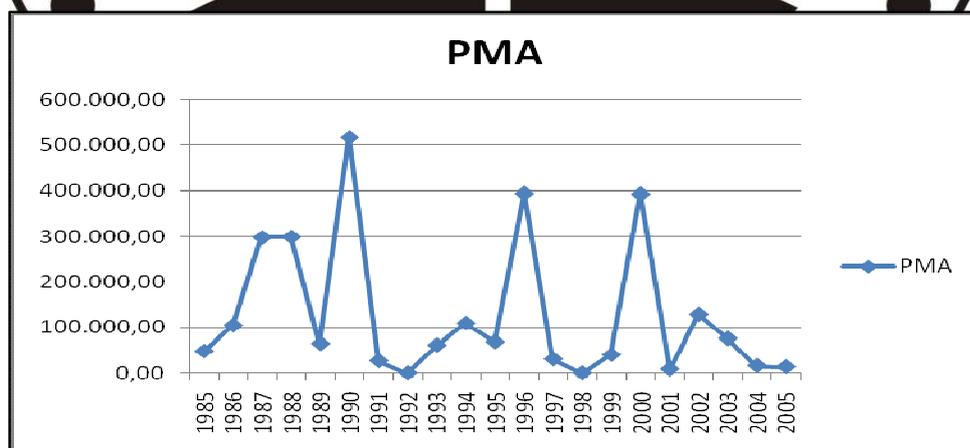
Tahun	PMDN (juta rupiah)		Pertumbuhan	PMA (juta rupiah)		Pertumbuhan
	Proyek	PMDN		Proyek	PMA	
1985	9	48.138,00	-	1	1.000,00	-
1986	10	104.353,00	116,7788442	4	32.993,00	3199,3
1987	24	298.360,00	185,9141568	1	6.904,00	-79,0743491
1988	25	299.522,00	0,389462394	2	1.890,00	-72,6245655
1989	13	64.634,00	-78,4209507	2	9.000,00	-379,190476
1990	14	518.369,00	702,0066838	3	16.300,00	81,1111111
1991	3	26.505,65	-94,8867216	1	1.000,00	-93,8850307
1992	0	0,00	-100	0	0,00	100
1993	7	61.075,37	0	0	0,00	0
1994	4	109.067,50	78,57853338	2	10.010,30	100
1995	7	68.433,00	-37,2562862	4	20.832,49	-106,110546
1996	7	394.593,50	476,6128914	8	18.694,60	-16,2672874
1997	2	30.305,00	-92,3199444	2	2.379,00	-87,2744001
1998	0	0,00	-100	6	4.347,00	82,7238335
1999	2	40.000,00	100	10	23.841,00	448,447205
2000	2	393.244,00	883,11	5	29.924,00	28,5148693
2001	1	8.405,00	-97,8626502	2	2.861,00	90,4391124
2002	1	128.550,00	1429,446758	7	10.514,00	267,493883
2003	1	75.540,00	-41,2368728	7	3.555,00	-63,3346015
2004	2	15.950,00	-78,8721207	3	10.766,00	179,273671
2005	2	13.747,00	-13,746714	1	8.833,00	-17,9546721
Jumlah	140	2.698.592,02	3376,236169	72	215.944,39	4253,33658
Rata-rata	6,666667	128.500,10	466,8118085	5,42857	10.283,07	212,666829

Sumber: BPS Jawa Barat

Dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas pada tahun 1994-1995 investasi dalam negeri mengalami penurunan dari Rp. 109.067.50 juta pada tahun 1994 menjadi Rp. 68.433.00 juta pada tahun 1995. Sedangkan PMA mengalami kenaikan pada tahun 1994 dari Rp. 10.010.30 juta menjadi Rp. 20.832.49juta pada tahun 1995

optimisme publik terhadap kondisi perekonomian nasional yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,2% dan dikeluarkannya PP No. 35 Tahun 1996 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sehingga para investor asing mengalihkan investasinya ke sektor pertanian dan para investor dalam negeri agak tersingkirkan dalam bentuk jumlah investasi serta pemerintah memberikan relaksasi pada perusahaan-perusahaan dengan 100% kepemilikan asing diberikan waktu selama 20 tahun untuk mengurangi kepemilikan saham mereka menjadi 51% pada tahun 1996, pemerintah menyetujui untuk memberlakukan kembali pembebasan pajak sementara untuk industri-industri dalam sektor-sektor yang terpilih (Rudisrawiro, 1998:381-38).

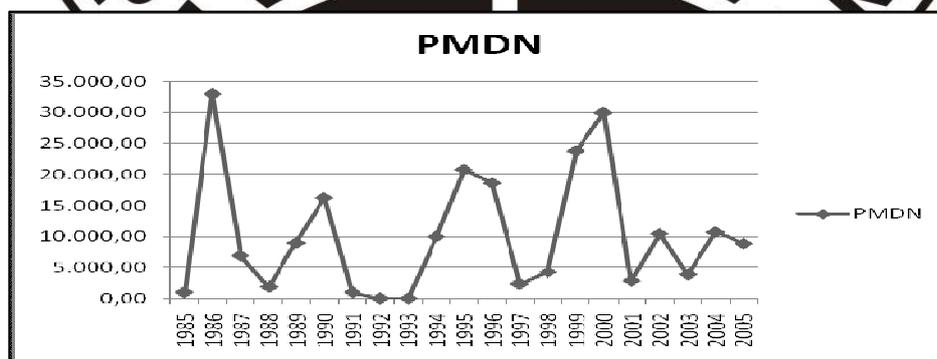
Tahun 1996 gairah investasi ditunjukkan oleh investor dalam negeri yang tidak mau kalah dengan investor luar dengan menaikan jumlah investasi di bidang pertanian sebesar Rp. 394.593,50 juta. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah memberikan pengaruh positif bagi para investor dalam maupun luar negeri.



Sumber: BKPM, BPS diolah

Gambar 4.2
Perkembangan PMA di Sektor Pertanian Jawa Barat
Periode Tahun 1985-2005

Akan tetapi pada awal memasuki krisis ekonomi para investor kembali menarik investasinya disektor pertanian dengan alasan akan merugikan mereka, sehingga pada tahun 1997 mengalami penurunan investasi dalam negeri Rp. 394.593,50 juta pada tahun 1996 menjadi Rp. 30.305,00 juta tahun 1997 dan Rp. 18.694,60 juta rupiah pada tahun 1996 turun menjadi Rp. 2.379,00 juta pada tahun 1997, karena dalam jangka waktu itu pemerintah tidak memberikan kepastian hukum kepada para investor terutama investor asing. Akan tetapi pada tahun 1998-2000 iklim investasi sektor pertanian kembali kembang dikala sektor lain mengalami kegoncangan akibat terjadi krisis multidimensi, dimana sektor pertanian bertahan dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Jawa Barat terutama setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah dapat melaksanakan otonomi sendiri. Sehingga kurun waktu tersebut investasi asing meningkat tahun 1998 Rp. 4.347,00 juta rupiah, tahun 1999 Rp. 23.841,00 juta rupiah, dan tahun 2000 Rp. 29.924,00 juta rupiah Tetapi PMDN pada tahun 1998 nol hal ini disebabkan karena tidak adanya suntikan dana dari pemerintah.



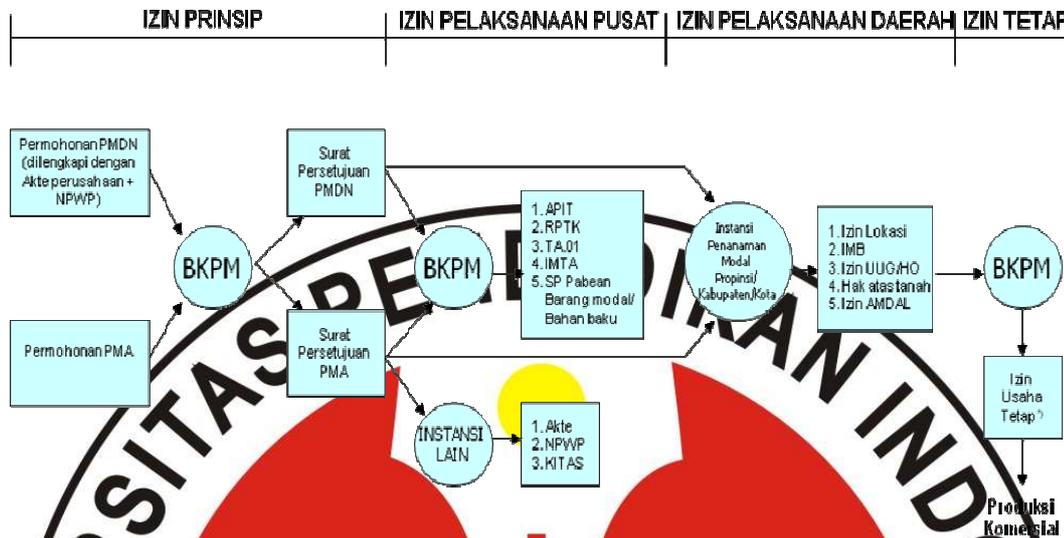
Sumber: BKPM, BPS diolah

Gambar 4.3
Perkembangan PMDN di Sektor Pertanian Jawa Barat
Periode Tahun 1985-2005

Perkembangan PMA dan PMDN pada tahun 2001-2005 mengalami fluktuatif pada sektor pertanian hal ini terjadi karena dipacu oleh tragedi 11 September 2001 yaitu hancurnya WTC (World Trade Center) dan Pentagon (pusat pertahanan tentara AS) oleh serangan teroris dan menyusul tanggal 12 oktober 2002 terjadi Bom Bali yang menyebabkan terhambaynya arus investasi ke Indonesia (**Pikiran Rakyat**, Kabari, 10 Juli 2003) akan tetapi walaupun tahun 2001-2002 terjadi ancaman teroris tidak menghambat PMA dan PMDN untuk menanamkan investasinya disektor pertanian di Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 2.861,00 juta pada tahun 2001 dan tahun 2002 naik menjadi Rp 10.514,00 juta serta Rp. 8.405,00 juta pada tahun 2001 menjadi Rp. 128.350,00 juta pada tahun 2002. Walaupun pada tahun berikutnya sampai tahun 2005 mengalami penurunan akan tetapi pemerintah berupaya untuk meningkatkan kembali iklim investasi dengan menerbitkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu berusaha untuk meningkatkan sistem kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, memberikan perlakuan yang sama dan tidak asal negara, menjunjung tinggi kebersamaan guna tercapainya kesatuan ekonomi nasional.



Alur Pengajuan Persetujuan/Perizinan Dalam Rangka Pendirian Perusahaan PMDN dan PMA di Indonesia



Gambar 4.4 Alur Pengajuan Persetujuan/Perizinan Dalam Rangka Pendirian Perusahaan PMDN dan PMA di Indonesia

4.1.3 Perkembangan Tenaga Kerja

Perkembangan jumlah tenaga kerja juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Perkembangan jumlah penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian pada kurun waktu 1985-2005 berjumlah 105013977 juta orang, dengan rata-rata pertumbuhan -0,81% pertahun, dan kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat 33,09% pertahun. Penyerapan tenaga kerja pada repleta IV (1985-1990) menunjukkan pertumbuhan negatif (-4,12%) karena pada tahun tersebut terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, hal ini dapat mengindikasikan peyerapan tenaga kerja pertanian yang semakin menurun dari tahun ke tahun masing-masing tahun 1985 (5865953 juta), tahun 1986 (5353547 juta), tahun 1987 (4572086 juta), tahun 1988 (5590853 juta), tahun 1989 (5119956 juta), dan tahun 1990 (4549695 juta), hal ini pun sejalan dengan yang diungkap oleh Soekartawi (1995:58), merupakan salah

satu ciri transformasi struktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDRB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun.

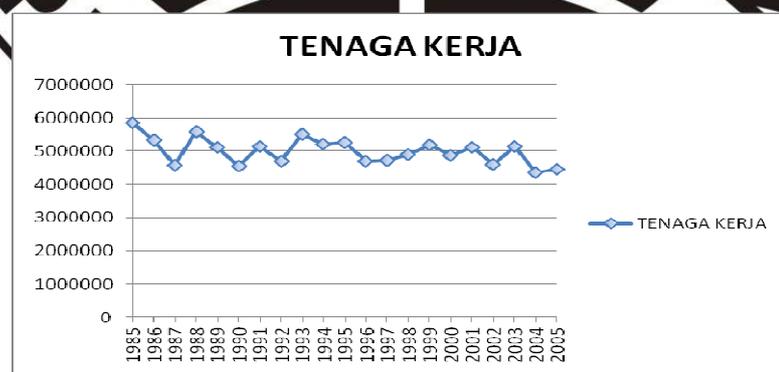
TABEL 4.3
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Jawa Barat
Periode Tahun 1985-2005

Tahun	Tenaga Kerja	PDRB Pertanian (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)	Produktivitas tenaga kerja (juta)	Kontribusi terhadap sektor pertanian (%)
1985	5865953	2582930,39		0,440326	34,57
1986	5353547	2718818,18	-8,73525581	0,507654	31,07
1987	4572086	2738090,6	-14,5970699	0,598871	33,12
1988	5590853	2987148,55	22,28232365	0,534292	33,44
1989	5119956	3135350,31	-8,42263247	0,612378	34,15
1990	4549695	3328747,41	-11,1380059	0,731642	35,3
1991	5149953	3419646,84	13,19336791	0,664015	30,73
1992	4712690	3692757	-8,49062118	0,783577	34,4
1993	5512114	9107764	16,96322058	1,652318	37,71
1994	5230998	8989698	-5,09996709	1,718544	35,71
1995	5273273	9350686	0,808163184	1,773222	35,12
1996	4697917	9383964	-10,9107949	1,997473	32,35
1997	4724853	8675504	0,573360491	1,836143	31,5
1998	4898469	8013996	3,674527017	1,636021	32,19
1999	5203953	9098516	6,236315877	1,748386	31,7
2000	4865547	7842831	-6,50286426	1,611911	29,69
2001	5126660	8068324,88	5,407675643	1,573184	32,55
2002	4599956	8047240,51	-10,3088136	1,749419	32,07
2003	5158605	7908908,31	12,14465964	1,53314	34,87
2004	353604	34038120,63	-15,6050184	7,812578	29,82
2005	4450735	34691239,65	2,230129337	7,794567	29,95
Jumlah	105013377	107870291,2	16,297295	39,31567	695
Rata-rata	5000637	894322,395	-1,8136476	1,872175	33,09

Akan tetapi pada Repelita V (1990-1995) penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 1.04% pertahun itu ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi diatas 6%, sehingga dengan laju penyerapan tenaga kerja tersebut, andil peningkatan tenaga kerja meningkat dari seperempat peningkatan jumlah tenaga kerja disektor pertanian, maka penciptaan

lapangan kerja baru akan mampu memenuhi tambahan angkatan kerja, ini yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 1990 s/d. 1997 (**Makmun dan Akhmad Yasin, 2003 :75**).

Namun dengan adanya krisis moneter tahun 1997-1998 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekalipun Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang negatif diatas -13% pada tahun 1998 dan diatas -2% pada tahun 1999, akan membuat industri yang ada tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang baru untuk menampung tambahan-tambahan angkatan kerja, akan tetapi pada saat itu sektor pertanian mengalami surplus tenaga kerja pada tahun 1996 sebesar 4697017 juta orang, 4724853 juta orang pada tahun 1997 semakin meningkat sampai tahun 1999 sebesar 5203953 juta orang, karena menurut **Branson WN (1989)** Tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negeri. Hal ini akibat dari industri yang ada tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang baru untuk menampung tambahan-tambahan angkatan kerja yang ter-PHK akibat krisis moneter.



Sumber: BPS diolah

Gambar 4.4
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja
di Sektor Pertanian Jawa Barat
Periode Tahun 1985-2005

Ada beberapa faktor yang membuat industri kesulitan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja. Yang pertama, naiknya suku bunga pinjaman investor menunda untuk melakukan investasi baru. Yang kedua, krisis keuangan yang diikuti dengan ketidakstabilan politik membuat kepercayaan investor atau depositor terhadap industri perbankan di Indonesia mencapai titik terendah. Terjadilah *capital flight*. Yang ketiga, meskipun turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional, namun kenyataannya nilai ekspor Indonesia tidak mengalami peningkatan yang tajam. Akibat dari hal tersebut adalah *capital formation* tidak terbentuk, bahkan cenderung negatif. Penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, bahkan yang terjadi adalah meningkatnya pengangguran, mengingat banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas produksinya atau bahkan meruntuhkan usahanya. (Makmun dan Akhmad Yasin, 2003 :75-76).

Setelah krisis ekonomi, dari tahun 2000-2005 perkembangan penyerapan tenaga kerja berfluktuatif. Hal ini dikarenakan dengan semakin tingginya pendidikan SMA keatas memberikan pengaruh pada peningkatan produktifitas tenaga kerja dimana setiap tahun tingkat produktivitasnya adalah 1.6 juta pertahun, 1.6 juta pertahun, 1.7 juta pertahun, 1.5 juta pertahun, 7,8 juta pertahun, dan 7,8 juta pertahun. Walaupun pada kenyataannya tingkat penyerapan tenaga kerja pada kurun waktu tersebut mengalami penurunan tapi tingkat produktivitasnya semakin naik. Hal ini karenakan pemerintah melihat pertanian (agribisnis) adalah sektor yang cukup tangguh melawan tekanan krisis ekonomi dan memiliki prospek baik untuk dikembangkan. Walaupun dinilai belum

optimal oleh dunia usaha, kebijakan pemerintah sedikit banyak telah mendorong dunia usaha untuk menanamkan investasi di sektor ini sehingga tingkat produktivitas meningkat. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tetap konsisten membangun pertanian (agribisnis), diharapkan kinerja pertanian semakin membaik. Prospek pertanian (agribisnis) ke depan masih baik dilihat dari sisi potensi produksi (supply side) dan sisi pasar (demand side).

(Ringkasan Ceramah Ekonomi Prof. Dr. Bungaran Siragih, Mec dan Dr. Tungkot Siyung di Bank BNI, 22 Pebruari 2007, Adhy Basar 2007:2)

Dalam usaha mengoptimalkan sektor pertanian perlu memperhatikan karakteristik sektor ini, baik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan investasi (pemerintah atau swasta). Skala usaha dan variasi setiap komoditas membutuhkan kebijakan yang berbeda dan komprehensif meliputi seluruh sistem komoditas tersebut. (Adhy Basar, 2007 :6)



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengujian Model Penelitian

Berdasarkan data yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis Eviews (Econometric Views) 5.1 diperoleh hasil pengujian model sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pengujian Model Penelitian

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	signifikansi
C	83.48567	16.89793	3.162588	0.0069	
LOG(PMDN)	-0.383893	0.112856	-3.400884	0.0043	Signifikan
LOG(PMA)	0.237267	0.134922	1.758550	0.0425	Signifikan
LOG(TK)	-4.252335	1.691050	-2.514612	0.0241	Signifikan
R-squared	0.623817	Mean dependent var			15.70660
Adjusted R-squared	0.543206	S.D. dependent var			0.730721
S.E. of regression	0.534421	Akaike info criterion			1.77864
Sum squared resid	3.998479	Schwarz criterion			1.075124
Log likelihood	-12.00077	F-statistic			7.708646
Durbin-Watson stat	1.521866	Prob(F-statistic)			0.001742

Sumber: Pengujian model Eviews 5.1

Dari hasil perhitungan diatas maka diperoleh persamaan model sebagai berikut:

$$\text{LOG(PDRB)} = 83.48564757 + 0.237266039 \text{ Log(PMA)} - 0.3838093213 \text{ Log(PMDN)} - 4.252341705 \text{ Log(TK)}$$

$$t = (3.162588) \quad (1.758550) \quad (-3.400884) \quad (-2.514612)$$

$$R^2 = 0.623817$$

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati sempurna sebesar 0.623817 atau 62,38 %. Koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat kualitas model, selain itu dapat melihat masalah multikolineartas. Untuk hasil estimasi diatas diduga model tidak terkena multikolineartas karena nilai R^2 -nya tidak terlalu besar hanya sebesar 62,38 % dan sisanya 37,62% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Karena diduga penelitian terkena multikolineartas apabila R^2 diatas 0.7 - 1.0 (Ashton de Silva, 2003). Tetapi didalam model untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam model ini harus diuji dengan Asumsi Klasik, yaitu:

4.2.2 Uji multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel independen yang satu dengan variable independen lainnya mempunyai hubungan korelasi linier atau tidak yang akibatnya masing-masing variabel independen sulit dibedakan sehingga akan terjadi kebiasaan dalam model. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan EViews 5.1 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Korelasi Antar Variabel

	PDB	TK	PMDN	PMA
PDB	1.000000	-0.500051	-0.281534	0.028434
TK	-0.500051	1.000000	-0.199366	-0.105613
PMDN	-0.281534	-0.199366	1.000000	0.394028
PMA	0.028434	-0.105613	0.394028	1.000000

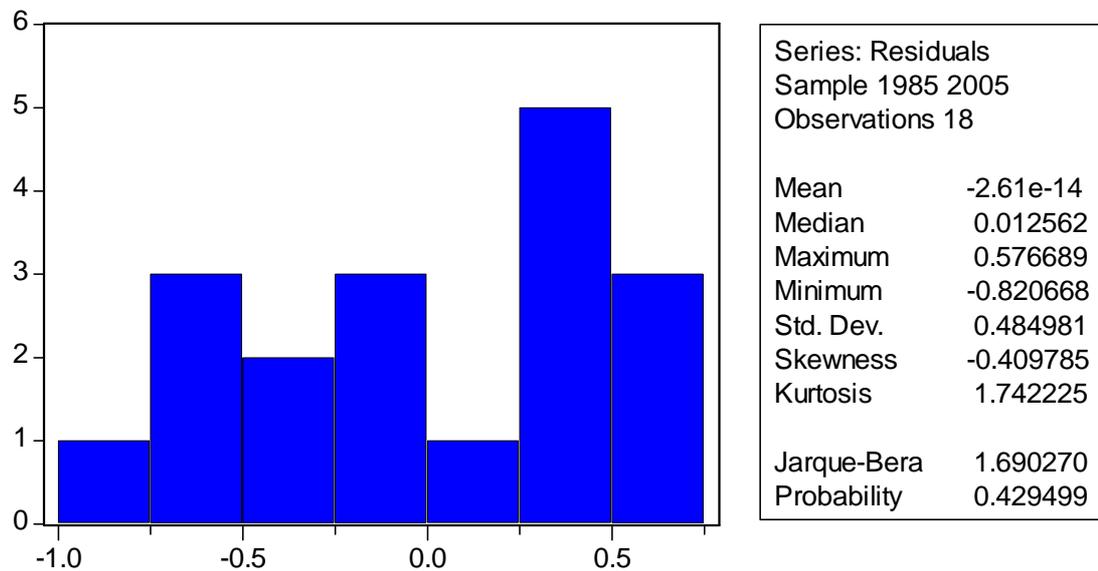
Sumber: Pengujian korelasi Eviews 5.1

Berdasarkan hasil analisis diperoleh data seperti pada tabel di atas menunjukkan korelasi antar variabel penelitian, diketahui bahwa variabel-variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas, hal tersebut terlihat dari korelasi atau hubungan antar variabel bebas yang relatif kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terdapat atau terbebas dari multikolinearitas.

4.2.3 Uji Normalitas (Normality Test)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji normalitas untuk menguji kenormalan dari variabel pengganggu. Tujuan dari penggunaan uji ini adalah untuk menguji apakah variabel pengganggu terdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normal tidaknya faktor pengganggu e_i dapat dipergunakan Jarque-Bera Test (*JB-Test*). Selanjutnya nilai $JB_{hitung} = \chi^2_{hitung}$ dibandingkan dengan χ^2_{tabel} .

Jika JB_{hitung} lebih besar dari χ^2_{tabel} maka hipotesis (H_0) yang menyatakan residual berdistribusi normal ditolak, begitupun sebaliknya.



Gambar 4.5 Uji Normalitas Jarque-Berra

Sumber: Pegujian normalitas Jarque-Berra Eviews 5.1

Dari gambar di atas, nilai JB_{hitung} diperoleh dari nilai Skweness diamban Kurtosis $(-0.409785+1.742225=1.33244)$. Nilai JB_{hitung} dikalikan dengan 2 $(1.33244 \times 2 = 2.66488)$, kemudian dibandingkan dengan χ^2_{tabel} dengan probabilitas 5% dan $df=21-3=18$, diperoleh nilai χ^2_{tabel} sebesar 9.39. Karena nilai JB_{hitung} (2.66488) lebih kecil dari χ^2_{tabel} (9.39), maka hipotesis yang menyatakan residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Ini berarti bahwa residual memang terdistribusi normal.

4.2.4 Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah fungsi yang digunakan dalam penelitian berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. Pada penelitian ini uji

linieritas diukur dengan menggunakan Ramsey (*Ramsey Reset Test*). Untuk menerapkan uji ini, perlu dicari nilai F_{test} untuk kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} . Jika F_{test} lebih besar dari F_{tabel} dengan taraf keyakinan 95%, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar ditolak, begitupun sebaliknya. Dengan menggunakan perhitungan Eviews 5.1 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Liniaritas Data Ramsey

Ramsey RESET Test:			
F-statistic	1.867743	Probability	0.196701
Log Likelihood ratio	4.878212	Probability	0.007239

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai F_{test} sebesar 1.867743 dengan probabilitas 0.196701. Karena F_{test} (1.196701) < F_{tabel} (3.07), maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah tidak dapat ditolak. Ini menandakan bahwa model yang digunakan berbentuk linier.

4.2.5 Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity Test)

Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Test*. Berdasarkan hasil perhitungan melalui Eviews 5.1 didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pengujian White Heteroskedatis

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.544646	Probability	0.739612
Obs*R-squared	3.329304	Probability	0.649358

Sumber: Pengujian White Heteroskedatis Eviews 5.1

Hasil penghitungan melalui *White Heteroscedasticity Test* menghasilkan nilai R^2 yang telah disesuaikan (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0.184961. Jika nilai R^2 *Adjusted* dikalikan dengan jumlah data (n) lebih kecil dari nilai χ^2_{tabel} , maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi adalah ditolak. Nilai $R^2 = 0.184961 \times 21 = 3,884181$; sedangkan nilai χ^2_{tabel} dengan $df = 21 - 5 = 18$ sebesar 28.8693, maka dapat disimpulkan bahwa R^2 *Adjusted* $<$ χ^2_{tabel} berarti hipotesis yang menyatakan terdapat persoalan heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi adalah ditolak. Ini berarti dalam model estimasi tidak terdapat heteroskedastisitas, atau dengan kata lain gangguan (*disturbance*) ϵ_i yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastis.

4.2.6 Uji Autokorelasi (Autocorrelation Test)

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Adanya gejala autokorelasi dalam regresi menyebabkan model yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk menduga nilai variabel dependen dari variabel *independen* tertentu. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka peneliti menggunakan metode *Durbin-Watson* dua sisi dengan kriteria $d_U < d < 4 - d_U$.

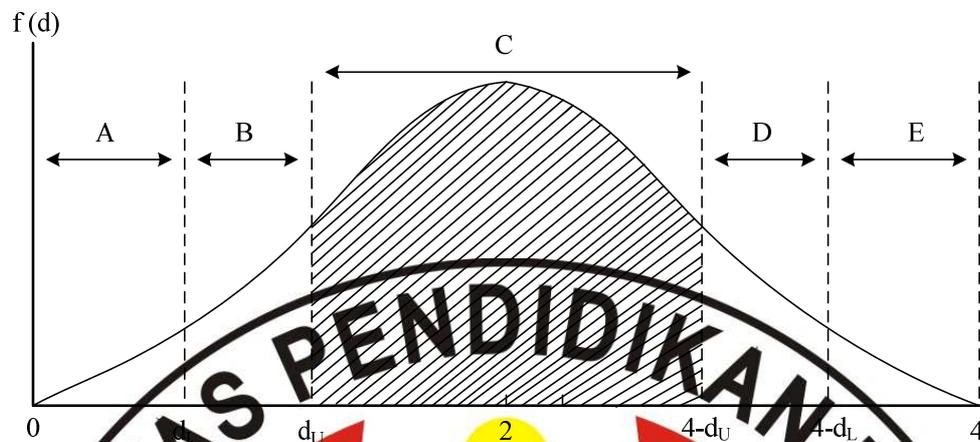
Tabel 4.8 Pengujian Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.771453	31.12822	-0.024783	0.9806
LOG(PMA)	-0.124814	0.163858	-0.761718	0.4609
LOG(PMDN)	0.139366	0.162779	0.856165	0.4087
LOG(TK)	0.020589	2.021844	0.010183	0.9920
RESID(-1)	0.506158	0.410223	1.207610	0.2505
RESID(-2)	0.112399	0.414731	0.393162	0.7011
R-squared	0.132241	Mean dependent var	-2.61E-14	
Adjusted R-squared	-0.229326	S.D. dependent var	0.484981	
S.E. of regression	0.537722	Akaike info criterion	1.878252	
Sum squared resid	3.469740	Schwarz criterion	2.753042	
Log likelihood	-10.72426	F-statistic	0.365741	
Durbin-Watson stat	1.762857	Prob(F-statistic)	0.862382	

Sumber: Pengujian Autokorelasi Eviews 5.1

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi sebelumnya terlihat bahwa d_{hitung} sebesar 1.521866 yang berarti terjadi autokorelasi karena d_{hitung} lebih besar daripada d_U (1.67) untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan regresi nilai turunan. Dalam hal ini turunan regresi yang digunakan adalah turunan pertama. Dimana sebelumnya diketahui bahwa d_U sebesar 1.67 dan d_L sebesar 1.03. Berdasarkan hasil perhitungan regresi turunan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan (lihat tabel) diperoleh hasil d_{hitung} sebesar 1.762857. dengan d_U sebesar 1.67 dan d_L sebesar 1.03 sehingga $1.67 < 1.762857 < 2.33$ sehingga dalam model yang diujikan tidak terdapat autokorelasi.

Statistik d Durbin-Watson

4.2.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan pengujian dua sisi (*two side*) atau satu ujung (*two tail*), hal ini dilakukan karena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat masih ada kemungkinan hipotesis yang dilakukan berbeda. Tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% atau residu sebesar 5% ($\alpha = 5\%$). Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.2.7.1 Uji t

Uji t merupakan prosedur pengujian hipotesis secara parsial, dalam hal ini ingin diketahui apakah Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penyerapan tenaga kerja berpengaruh secara parsial terhadap PDRB Sektor Pertanian. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Eviews 5.1 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t)

Variabel	t_{hitung}		t_{tabel}	Keputusan	Pengaruh
Penanaman Modal Asing (PMA)	1.758550	>	1.740	Menolak H_0	Signifikan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	-3.400884	>	-1.740	Menolak H_0	Signifikan
Peyerapan Tenaga Kerja	-2.514612	>	-1.740	Menolak H_0	Signifikan

Sumber: Pengujian Model Eviews 5.

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa Nilai t_{hitung} untuk variabel PMA sebesar 1.758550 yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $df=n-4=21-4=17$ buah adalah 1.740; menolak H_0 dan menerima H_1 yang berarti PMA berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian.

Untuk t_{hitung} variabel PMDN sebesar -3.400884 dan t_{tabel} -1.740. Maka $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hipotesis ini menolak H_0 dan menerima H_1 yang berarti PMDN berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap PDRB sektor pertanian, atau dengan kata lain bahwa peningkatan PMDN akan menurunkan PDRB sektor pertanian. Padahal dalam hipotesis sebelumnya menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian.

Nilai t_{hitung} untuk variabel penyerapan tenaga kerja sebesar -2.514612 yang menandakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-1.740). Sehingga jauh didaerah penolakan H_0 maka hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien regresi signifikan dapat diterima, atau dengan kata lain bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja akan menurunkan PDRB sektor pertanian dengan arah negatif, itu sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan pengaruh Penyerapan tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif.

4.2.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama; untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kriteria pengujian nilai F adalah jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan taraf keyakinan 95%, maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh secara serempak atau secara bersama-sama dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 7.738646 dan F_{tabel} sebesar 3.16 dari df pembilang 3, penyebut 18, dengan taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen PMA, PMDN, Penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.

4.2.7.3 Koefisien Determinasi

Uji determinan dilakukan untuk mengetahui berapa persen perubahan variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.623817 berarti 62.38% PDRB di Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penyerapan Tenaga Kerja (TK) sedangkan sisanya 37.62% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan pengujian model diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{LOG(PDRB)} = 83.48564757 + 0.237266039 \text{ Log(PMA)} - 0.3838093213 \text{ Log(PMDN)} \\ - 4.252341705 \text{ Log(TK)}$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya PDRB apabila tidak ada variabel bebas yang mempengaruhinya maka besarnya adalah 83.48564757 triliun. Selanjutnya, apabila variabel bebas PMA semakin baik atau meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.237266039 triliun, kemudian apabila variabel bebas PMDN meningkat satu satuan, maka akan mengurangi jumlah PDRB sektor pertanian sebesar 0.3838093213 triliun, selanjutnya apabila variabel bebas penyerapan tenaga kerja meningkat satu satuan, maka akan mengurangi PDRB sektor pertanian sebesar 4.252341705 triliun.

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa semua variabel bebas yaitu PMA, PMDN, dan Penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat terlihat dari koefisien determinasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 0.623817 yang berarti tingkat kecocokan model sebesar 62.38%. PDRB di Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penyerapan Tenaga Kerja (TK) sedangkan sisanya 37.62% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model dalam peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat.

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji *t*) diperoleh hasil bahwa PMA berpengaruh secara positif terhadap PDRB karena t_{hitung} 1.758550 lebih besar dari t_{tabel} 1.740. Untuk PMDN berpengaruh dengan arah negatif

terhadap PDRB sektor pertanian dimana $t_{hitung} -3.400884$ lebih besar dari $t_{tabel} -1.740$ dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian dengan arah negatif dimana $t_{hitung} -2.514612$ lebih kecil dari $t_{tabel} -1.740$. Sedangkan secara simultan (Uji F) semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat dengan $F_{hitung} 7.738646 > \text{dar } F_{tabel} 3.16$.

Dalam hasil pengujian ada hal yang tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya yaitu untuk variabel bebas PMDN memiliki hipotesis yang terbalik, dimana pada awalnya hipotesis untuk arah PMDN adalah positif akan tetapi setelah dilakukan uji hipotesis ternyata PMDN mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.

4.3.1 Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa Penanaman Modal Asing mempunyai koefisien yang positif terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat. Semakin tinggi investasi luar negeri (PMA) yang masuk maka akan semakin besar PDRB sektor pertanian yang dihasilkan. Menurut hasil penelitian **Tulus Tambunan dan KADIN Indonesia** secara teori, PMA berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jalur. Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru yang berarti juga **penambahan output atau produk domestik bruto (PDB) atau PDRB**, total ekspor (X) dan

kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan ekspor berarti penambahan cadangan devisa yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M). Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya pembangunan pabrik-pabrik baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di sektor-sektor lain tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima. Dalam kasus lain semakin besar komponen impor dari sebuah proyek PMA, atau semakin besar "kebocoran" dari keterkaitan produksi antara PMA dengan ekonomi domestik, semakin kecil efek penggandaan tersebut. Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra

permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah. Keempat, peran PMA sebagai sumber penting pelatihan teknologi dan knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan PMA ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah.

Penelitian Tulus Tambunan dan KADIN, 2007:2-3)

Peran penting dari PMA sebagai salah satu sumber penarik pembangunan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru tidak bisa disangkal. Selama periode tersebut, pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia memang sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994. Juga tidak bisa diungkai bahwa pertumbuhan investasi dan PMA pada khususnya di Indonesia selama era Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya.

(Survei LPEM-FEUI, 2001:15).

Pihak Islamic Development Bank (**IDB**) Arab Saudi bersedia mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan di kawasan Timur Tengah dan co-financing dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan pertanian di Indonesia. Disamping pola pembiayaan oleh pemerintah, juga terdapat one-step loan yang pemanfaatannya dapat diajukan secara langsung oleh pihak swasta dan BUMN

Dilihat pada tingkat dunia, Indonesia juga termasuk negara penting tujuan PMA selama era pra-krisis 1997. Bahkan selama periode 1990-1997, yang dapat dikatakan sebagai masa saat perkembangan ekonomi Orde Baru mencapai titik klimaksnya, peringkat Indonesia masuk dalam 20 besar negara-negara penerima PMA yang diukur dalam nilai juta dollar AS. Posisi Indonesia dengan nilai arus masuk PMA-nya mencapai hampir 23,7 miliar dollar AS, hanya lebih rendah dari Singapura dan Malaysia di dalam kelompok ASEAN. Namun, akibat krisis 1997 dan jatuhnya pemerintahan Soeharto yang sejak itu hingga saat ini pemerintahan pasca krisis belum mampu sepenuhnya menciptakan iklim berusaha/berinvestasi yang kondusif, Indonesia menjadi negara paling buruk di dalam kelompok ASEAN dalam hal perkembangan PMA. (Database UNCTAD dan OECD tahun 2006-7-8)

Pesatnya arus masuk PMA ke Indonesia selama periode pra-krisis 1997 tersebut tidak lepas dari strategi atau kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto waktu itu yang terfokus pada industrialisasi selain juga pada pembangunan sektor pertanian. Investasi memang sangat penting sebagai motor utama perkembangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Walaupun

pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah juga penting, tetapi tanpa investasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak bisa tercapai. Namun demikian, harus diakui bahwa PMA, khususnya dari negara-negara maju, tetap lebih penting daripada PMDN, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia karena tiga alasan utama. Pertama, PMA membawa teknologi baru dan pengetahuan lainnya yang berguna bagi pembangunan di dalam negeri. Kedua, pada umumnya PMA mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di Indonesia. Ketiga, bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang berorientasi ekspor, biasanya mereka sudah memiliki jaringan pasar global yang kuat, sehingga tidak ada kesulitan dalam ekspor.

4.3.2 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan keterangan bahwa PMDN berpengaruh negatif terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat artinya semakin tinggi PMDN yang ditanamkan kedalam sektor pertanian akan menurunkan jumlah PDRB sektor pertanian di Jawa Barat. Alasannya sederhana, pergerakan ekonomi nasional sejak akhir 1999 hingga kini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi bukan oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Jika pola pertumbuhan ekonomi terus seperti ini tanpa adanya kontribusi yang berarti dari investasi, dapat dipastikan pertumbuhan tersebut tidak dapat berlanjut terus (Tambunan, 2000:198). Seharusnya dengan adanya

investasi perkembangan PDRB meningkat karena adanya modal untuk menghasilkan output/produksi. Jika dirunut kembali perkembangan penanaman modal dalam negeri di Jawa Barat selama periode tahun 1980–2002 berfluktuasi sejak tahun 1980 penanaman modal mengalami peningkatan yang merupakan akibat dari membaiknya perekonomian saat itu. Tetapi pada tahun 1997 mengalami penurunan hal ini merupakan imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia yang ditandai dengan inflasi sampai 67,10%. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan para investor terhadap perekonomian. Dalam 3 tahun terakhir Jawa Barat mulai menata kestabilan ekonominya yang menyebabkan tingkat inflasi dapat ditekan. Investasi mulai mendapat kepercayaan dan ingin kembali menanamkan modalnya.

Sejak 1997/1998 melalui program restrukturisasi, sebagian besar sektor kegiatan komersial umum makin terbuka bagi investor asing dengan proses perizinan yang lebih mudah. Menteri Pertanian diberikan mandat untuk memberikan rekomendasi karena meningkatnya investasi di bidang pertanian oleh investor asing sehingga peluang untuk masuknya PMDN terhambat oleh PMA karena nilai investasi asing lebih tinggi dari nilai investasi dalam negeri. Serta pemerintah membuka Investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia diberikan insentif, yaitu: (1) Pembebasan tarif bea masuk; (2) Insentif pajak untuk wilayah dan sektor prioritas; (3) Insentif untuk mengekspor produk-produk manufaktur; (4) Insentif bagi perusahaan pengolahan yang berlokasi di kawasan berikat (bonded zone); (5) Hak pemilikan/pengusahaan tanah dan bangunan; (6) Pembentukan kantor perwakilan BKPM di daerah;

(7) Risalah pajak untuk menghindari pemajakan ganda; dan (8) Penyediaan loss carried facilities selama kurun waktu 5 tahun. **(Laporan BKPM)**

4.3.3 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan PDRB sektor Pertanian di Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan keterangan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian di Jawa Barat artinya semakin tinggi penyerapan tenaga kerja maka akan menurunkan jumlah PDRB sektor pertanian di Jawa Barat. Koefisien tenaga kerja ini bertanda negatif menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi. Hal ini sejalan pula dengan tingkat efisiensi (*return on scale*) menurun, karena $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 < 1$.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Tulus Tambunan (1999:92) menunjukkan bahwa elastisitas kesempatan kerja tidak pernah lebih dari 0,50, ini berarti penambahan PDRB hanya mampu menambah kesempatan kerja 0,50 unit. Namun kalau dilihat per sektor ekonomi, maka elastisitas kesempatan kerja bervariasi cukup tinggi. Yang cukup menarik adalah elastisitas kerja di sektor pertanian, yaitu negatif. Ini berarti penambahan output di sektor pertanian hanya dilakukan dengan cara mengurangi tenaga kerja. Dengan kata lain peningkatan produksi hanya bisa dilakukan dengan memasukan faktor teknologi dan mengurangi pekerja.

Tabel 4.10 Elastisitas Kesempatan Kerja per Sektor Ekonomi, th.1999

Sektor Ekonomi	Elastisitas
Pertanian	(0.05)
Pertambangan	0.63
Manufaktur	0.56
Konstruksi	0.89
Perdagangan, Hotel dan Restourant	0.73
Jasa	0.85
Transportasi dan komunikasi	0.85

Sumber: Tambunan, Titus, *Perekonomian Indonesia: Ghalia Indonesia*, hal. 92

Dampak krisis moneter dan ekonomi telah menimbulkan kelesuan ekonomi di semua sektor. Perusahaan yang semula diharapkan akan tumbuh dan berkembang menyerap angkatan kerja baru, terpaksa tertunda dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang. Sementara sudah mulai banyak perusahaan yang sedang mempersiapkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerjanya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Sesuai dengan Konvensi International Labour Organization (ILO), batasan penduduk usia kerja yang digunakan di sini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dengan kegiatan antara lain, sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya. (Makmun dan Akhmad Yasin, 2003:68)

Salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan modal. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks (Maknun dan Akhmad Yasin, 2003). Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (diatas 8%) maka penciptaan lapangan kerja baru akan mampu memenuhi tambahan angkatan kerja, ini yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 1990 s/d 1997.

Pertumbuhan ekonomi yang negatif selama tahun 1998 dan 1999, sangat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Dampak krisis moneter sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai elastisitas kesempatan kerja yang tinggi, yaitu sektor konstruksi, jasa dan transportasi/komunikasi. Krisis moneter yang hampir terjadi di semua negara berakibat permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan yang sangat tajam. Turunnya permintaan berdampak aktivitas perusahaan mengalami

stagnasi atau penurunan atau bahkan menghentikan produksinya. Bersamaan dengan itu penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik yang disebabkan karena penambahan penduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur, karena turunya aktivitas produksi. Kondisi diatas ternyata paralel dengan hasil studi dalam tulisan ini maupun hasil studi yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO), dimana sektor pertanian ternyata mampu menunjukkan perkembangan penciptaan tambahan lapangan kerja atau dengan kata lain dampak krisis tidak berdampak negatif terhadap sektor pertanian. Sebaliknya sektor lain justru mengalami pertunahan lapangan kerja yang negatif.

Produktivitas tenaga pertanian rendah karena menggunakan pelayan yang sederhana atau teknologi yang digunakan rendah. Sedangkan factor tanah dan tenaga kerja merupakan factor produksi yang utama. Pada tahap ini berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin menurun (*Law Of Diminishing Return*) karena terlalu banyak factor tenaga kerja yang bekerja dilahan yang terbatas. Juga penggunaan teknologi yang rendah, lembaga social yang belum berfungsi, jaringan komunikasi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang sangat minim menghambat pertumbuhan produksi.

4.3.4 Implikasi Pendidikan

Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Dalam manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada

tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, programatis dan berjenjang. Dalam *teori human capital* yang dikutip dalam Payaman J. Simanjuntak (2001:156) dikatakan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, material yang menentukan pertumbuhan produktivitas melalui investasi dirinya sendiri. Seseorang dapat memperluas alternatif untuk memilih profesi atau pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. *Human Capital* ini dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk investasi SDM di antaranya pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan dan gizi serta transmigrasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa faktor yang sangat penting bagi lancarnya pembangunan adalah modal baik modal yang berupa investasi ataupun modal dalam bentuk sumber daya manusia atau yang lebih kita ketahui adalah *human investment*. Kedua faktor tersebut mempunyai peran sentral dalam proses pembangunan. Besar kecilnya PDRB ditentukan oleh besar kecilnya investasi yang terdapat dalam suatu daerah. Investasi yang tinggi harus

didukung oleh SDM yang berkualitas, sehingga perpaduan diantara keduanya akan mempunyai peran yang besar terhadap PDRB yang dihasilkan.

Sebagaimana yang diungkap oleh **Muanananga** (2001:298) menyebutkan bahwa human capital dilihat dari sumber produktivitas, dan pertumbuhan produktivitas itu sendiri pada gilirannya merupakan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori *human capital* bahwa kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi karena sikap entrepreneur seseorang berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula sikap enterpreneurnya. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang maka pengetahuan yang dimilikinya akan semakin luas. Dengan semakin luasnya pendidikan, cara pandang terhadap suatu persoalan akan semakin luas dan komprehensif. Begitu pula terhadap cara pandang ekonominya, seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan semakin berhasil dalam menjalankan usahanya daripada mereka yang berpendidikan yang lebih rendah.

Berdasarkan hal tersebut bahwa human capital yang berkualitas tercipta dari keadaan pendidikan daerah yang bersangkutan sehingga implikasinya terhadap peningkatan PDRB itu sendiri, karena dengan human capital yang berkualitas akan memberikan iklim positif terhadap penciptaan investasi yang ujungnya pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjang oleh pendapatan masyarakat yang tinggi maka akan meningkatkan mutu pendidikan Jawa Barat.

Pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi juga dinyatakan oleh ahli ekonomi klasik **JohnStuart Mill** yang dikutip dalam **Suryana** (2000:56-57) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-isaha untuk menghapus penghambat pembangunan, seperti adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam pengetahuan, perluasaan spesialisasi, dan perbaikan organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu efisiensi faktor-faktor produksi yang akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Menurut **Mill**, faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi, yaitu mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Maka implikasi peningkatan PDRB terhadap pendidikan berbanding lurus, jika pendidikan rendah (SDM) maka PDRB yang dihasilkan pun akan rendah, dan sebaliknya jika pendidikan tinggi (SDM berkualitas) maka PDRB yang dihasilkan pun akan semakin meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa perekonomian dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan hal penting yang dapat menentukan baik buruknya suatu negara. Pembangunan perekonomian dan pendidikan harus berjalan bersamaan, karena untuk membangun perekonomian yang kuat harus didukung dengan SDM yang baik, begitu pula sebaliknya untuk menciptakan SDM yang baik harus didukung oleh perekonomian yang baik pula.